



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN AKUNTABILITAS

MENUJU ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS KORUPSI

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

INSPEKTORAT

Daftar isi

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 232 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Konsinyering Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 98.5 Tahun 2019 Tentang Tim Penyusun Draft Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024
3. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Exit Meeting Evaluasi SAKIP dan RB MK Tahun 2021
4. Undangan Rapat Renstra 2020-2024 dan RKA-KL MK TA 2020
5. Laporan Kegiatan Pembahasan Rancangan Renstra K/L Mitra Kedeputian Polhukhankam



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 232 TAHUN 2019

TENTANG

KEGIATAN KONSINYERING PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020-2024

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 dan penyusunan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 sesuai perkembangan dan dinamika organisasi Mahkamah Konstitusi, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Konsinyering Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Kegiatan Konsinyering Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEGIATAN KONSINYERING PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020-2024.**
- KESATU : Menetapkan Kegiatan Konsinyering Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024, pada tanggal 11 s.d. 13 Oktober 2019 di Bogor, Jawa Barat;
- KEDUA : Membentuk Panitia yang bertugas mempersiapkan semua kelengkapan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, Peserta dan Narasumber Kegiatan Konsinyering Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024, sesuai dengan daftar pada Lampiran I;
- KETIGA : Memberikan hak keuangan kepada Panitia, Peserta dan Staf Pendukung sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku dan indeks Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 5 Desember 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 03 Oktober 2019
SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Jenderal MK
NOMOR 232 TAHUN 2019
Tanggal : 03 Oktober 2019

**DAFTAR PANITIA, PESERTA, DAN STAF PENDUKUNG
KEGIATAN KONSINYERING PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020-2024**

I. Panitia

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Pengarah | : | 1. M. Guntur Hamzah
2. Muhidin |
| 2. Ketua | : | Tatang Garjito |
| 3. Wakil Ketua | : | Endrizal |
| 4. Sekretaris | : | 1. Budi Hari Wibowo
2. Romi Sundara |
| 5. Seksi Kesekretariatan | : | 1. Windu Budiyanto
2. Aris Wahyu Hajianto
3. Chandra Okantara |
| 6. Seksi Keuangan, Akomodasi dan Konsumsi | : | 1. Debby Yelviona |
| 7. Seksi Acara, Persidangan, dan Protokol | : | 1. Siska Yuniza
2. Khurinin Kurnia P. |
| 8. Seksi Perlengkapan, Transportasi, dan Pengamanan/Pengawasan | : | 1. Achmad Djunaedi |

II. Peserta

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Tatang Garjito | 16. Johan Yustisianto | 31. Mardian Wibowo |
| 2. Budi Achmad Djohari | 17. Fajar Laksono | 32. Pan M. Faiz |
| 3. Pawit Haryanto | 18. Sri Handayan | 33. Debby Yelviona |
| 4. Wiryanto | 19. Budi Wijayanto | 34. Chandra Okantara |
| 5. Heru Setiawan | 20. Elisabeth | 35. Siska Yuniza |
| 6. Mulyono | 21. Murry Mirranda | 36. Santi Widiastuti |
| 7. Kurniasih Panti Rahayu | 22. Mundiri | 37. Debby Yelviona |
| 8. Triyono Edy Budhiarto | 23. Yuni Sandrawati | 38. Dian Dwi Hapsoro |
| 9. Ida Ria Tambunan | 24. Makhmudah | 39. Aris Wahyu H. |
| 10. Teguh Wahyudi | 25. Nor Rosyid Ardani | 40. Khurinin Kurnia P. |
| 11. Endrizal | 26. Nanang Subekti | 41. Windu Budiyanto |
| 12. Isti Widayanti | 27. Imam Margono | 42. Puguh Apriyanto |
| 13. Iman Sudirman | 28. Budi Hari Wibowo | 43. Achmad Djunaedi |
| 14. Sigit Purnomo | 29. Romi Sundara | |
| 15. Ina Zuchriyah | 30. Bisariyadi | |



III. Narasumber

- Narasumber :
1. Eselon I atau Sederajat dari Mahkamah Konstitusi
 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
 3. Direktorat Jenderal Anggaran

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran II : Keputusan Sekretaris Jenderal MK
NOMOR 232 TAHUN 2019
Tanggal : 03 Oktober 2019

**INDEKS HONOR
BAGI PANITIA, PESERTA DAN STAF PENDUKUNG
KEGIATAN KONSINYERING PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020-2024**

NO	JABATAN	INDEKS (Rp)	KETERANGAN
A.	Honor Narasumber		
	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	1.700.000,-	OJ
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	1.400.000,-	OJ
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	1.000.000,-	OJ
	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	900.000,-	OJ
B.	Honor Panitia		
	Penanggung Jawab	450.000,-	OK
	Ketua	400.000,-	OK
	Wakil Ketua	350.000,-	OK
	Sekretaris/Anggota	300.000,-	OK
C.	SPD	At cost	
D.	Transportasi		
	Transportasi diberikan kepada Eselon IV dan Staf		

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 98.5 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN DRAFT RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020-2024

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian pembangunan nasional secara menyeluruh;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf *a*, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan Tim Penyusun Draft Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2017 Nomor 158);

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PENYUSUN DRAFT RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020-2024.**
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Draft Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024, yang bertugas mulai bulan Mei 2019 s.d Desember 2019, dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Lingkup tugas Tim Penyusun Draft Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:
1. Mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015–2019 termasuk capaian kemajuannya;
 2. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Draft Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024;
 3. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan yang diperlukan dari Hakim Konstitusi, pejabat struktural, pejabat fungsional, unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK), dan pihak terkait lainnya;
 4. Menyusun Draft Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024;
 5. Melaporkan Hasil Penyusunan Draft Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Memberikan honor kepada Tim Penyusun Draft Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 dengan hak keuangan sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku dan indeks Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Mei 2019

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Jenderal MK
Nomor : 98.5 Tahun 2019
Tanggal : 2 Mei 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
DRAFT RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020-2024,**

- | | | | |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|
| 1. Pengarah | : | 1. M. Guntur Hamzah | 2. Muhidin |
| 2. Penanggung Jawab | : | 1. Tatang Garjito | 6. Wiryanto |
| | | 2. Mulyono | 7. Heru Setiawan |
| | | 3. Triyono Edy B | 8. Ida Ria Tambunan |
| | | 4. Budi A. Djohari | 9. Teguh Wahyudi |
| | | 5. Pawit Haryanto | 10. Kurniasih Panti R |
| 3. Ketua | : | 1. Endrizal | |
| | | 2. Isti Widayanti | |
| 4. Sekretaris | : | Budi Hari Wibowo | |
| 5. Anggota | : | 1. Fajar Laksono | 12. A. Dodi Haryadi |
| | | 2. Nanang Subekti | 13. Windu Budiyanto |
| | | 3. Romi Sundara | 14. Aris Wahyu H. |
| | | 4. Hasri Puspita Ainun | 15. Khurinin Kurnia P. |
| | | 5. Pan M. Faiz | 16. Chandra Okantara |
| | | 6. Mardian Wibowo | 17. Siska Yuniza |
| | | 7. Bisariyadi | 18. Santi Widiastuti |
| | | 8. Syukri Asy'ari | 19. Debby Yelviona |
| | | 9. Irfan Nurrachman | 20. Haifa Arief Lubis |
| | | 10. A. Edi Subiyanto | 21. Puguh Apriyanto |
| | | 11. Fransisca | |

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran II : Keputusan Sekretaris Jenderal MK
Nomor : 98.5 Tahun 2019
Tanggal : 2 Mei 2019

**INDEKS HONORARIUM
TIM PENYUSUN DRAFT RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN
2020-2024**

NO	JABATAN/HONOR	INDEKS (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengarah	Rp. 750.000,-	OB
2.	Penanggung Jawab	Rp. 700.000,-	OB
3.	Ketua	Rp. 650.000,-	OB
4.	Sekretaris	Rp. 500.000,-	OB
5.	Anggota	Rp. 500.000,-	OB

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1464/PR.00/07/2019

29 Juli 2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Rapat Renstra 2020-2024 dan RKA-KL MK TA 2020

Kepada
(Daftar Nama Terlampir)
di
Tempat

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat koordinasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 11, Gd. Mahkamah Konstitusi
Agenda Pembahasan : 1. Tujuan, sasaran strategis, sasaran program, output program, kegiatan, sasaran program, indikator program, indikator kegiatan (Renstra MK 2020-2024)
2. RKA-KL MK TA 2020
Pimpinan Rapat : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Agar pelaksanaan rapat berjalan lancar, tertib dan mengarah pada pencapaian tujuan, peserta diharapkan mempersiapkan bahan rapat serta hadir tepat waktu.
Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Tatang Garjito

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal;
2. Yth. Bapak Panitera.



Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Tatang Garjito - NIP. 19670513 198802 1 001
[Digital Signature-mk4206566989](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Lampiran

Nomor : 1464/PR.00/07/2019

Tanggal : 29 Juli 2019

1. M. Guntur Hamzah
2. Muhidin
3. Triyono Edy Budhiarto
4. Ida Ria Tambunan
5. Tatang Garjito
6. Teguh Wahyudi
7. Wiryanto
8. Heru Setiawan
9. Mulyono
10. Pawit Haryanto
11. Rubiyo
12. Budi Achmad Djohari
13. Kurniasih Panti Rahayu
14. Endrizal
15. Isti Widayanti
16. Iman Sudirman
17. Sigit Purnomo
18. Ina Zuchriyah
19. Johan Yustisianto
20. Fajar Laksono
21. Sri Handayani
22. Budi Wijayanto
23. Elisabeth
24. Murry Miranda
25. Mundiri
26. Yuni Sandrawati
27. Makhmudah
28. Nor Rosyid Ardani
29. Nanang Subekti
30. Imam Margono
31. Budi Hari Wibowo
32. Romi Sundara
33. S.H. Az-Zaky
34. Andi Hakim
35. Mastiur A. Pasaribu
36. Dewi hastuti
37. Mutia Fria Darsini
38. R.A. Indah Apriyanti
39. Gunawan
40. Ardli Nuryadi
41. Mochamad Arafah
42. Akbar Anatajaya
43. Arshinta Fitridiyani
44. Nerpi S
45. Jefriyanto
46. Ardiansyah Salim
47. Melati Kusuma Wardani
48. Debby Yelviona
49. Aris Wahyu Hajianto
50. Khurin'in Kurnia Putri
51. Windu Budiyanto
52. Chandra Okantara
53. Santi Widiastuti
54. Siska Yuniza
55. Dian Dwi Hapsoro
56. Wijang Ardi Rahmadi

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

Nomor : 3/2110/PR.00.01/02/2020

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Hal : Laporan Kegiatan Pembahasan Rancangan Renstra K/L Mitra Kedeputian
Polhukhankam
Tanggal : 03 Februari 2020

Dengan hormat, menindaklanjuti undangan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 00978/D.7/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 hal Undangan Pembahasan Rancangan Renstra Kementerian/Lembaga Mitra Kedeputian Polhukhankam bertempat di Ruang Rapat DH 1-3 Kementerian PPN/Bappenas, dengan agenda yaitu Rapat Pembahasan Rancangan Renstra K/L Mitra Kedeputian Polhukhankam, bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan dimaksud sebagai berikut:

1. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menugaskan pejabat / staf untuk menghadiri acara dimaksud (surat tugas terlampir):
 - a. Pawit Haryanto (Inspektur)
 - b. Endrizal (Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi)
 - c. Budi Hari Wibowo (Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran)
2. Jadwal Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 28 Januari 2020 dengan tujuan untuk membahas mengenai Rancangan Renstra K/L Mitra Kedeputian Polhukhankam
3. Adapun pokok pembahasan kegiatan adalah sebagai berikut:

**PENGENDALIAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH BIDANG
POLHUKHANKAM DAN AKRB, oleh Jaleswari Pramodhawardani, PLT. Deputi V
Kepala Staf Kepresidenan**

- Arahan Presiden kepada anggota kabinet, Rabu, 23 Oktober 2019
 - a. Pertama JANGAN KORUPSI! Ciptakan sistem yang menutup celah korupsi
 - b. Hanya ada Visi Misi Presiden
 - c. Kerja cepat, kerja keras, produktif



- d. Jangan terjebak rutinitas monoton
- e. Orientasi kerja pada hasil nyata, tidak hanya *sent* tetapi *DELIVERED*
- f. Terjun langsung cek lapangan temukan solusi
- g. Serius dalam bekerja
- Isu Strategis Bidang POLHUKHANKAM AKRB
 - a. Politik ; PILKADA 2020, PEMILU 2024
 - b. Pertahanan dan Keamanan; Kemandirian Inhan dan Isu Perbatasan, Radikalisme dan Terorisme, Moderasi Beragama
 - c. HAM ; RAN HAM, Bidang Perempuan dan Anak
 - d. Hukum ; Penataan Regulasi, Reformasi Hukum
 - e. Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi ; Stranas Pencegahan Korupsi, Penguatan Kinerja Birokrasi
 - f. Papua ; Kelanjutan Inpres 9/2017, penyiapan pasca Otsus, PON XX di Papua

AKSELERASI PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI REFORMASI BIROKRASI, oleh Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB

- Reformasi birokrasi sebagai katalisator pencapaian sasaran pembangunan nasional, adapun prioritas Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Manusia Dan Pengentasan Kemiskinan
 - b. Konektivitas Dan Pemerataan
 - c. Nilai Tambah Ekonomi Dan Kesempatan Kerja
 - d. Ketahanan Pangan, Dan Energi Dan Lingkungan Hidup
 - e. Stabilitas Pertahanan Dan Keamanan

MASUKAN PENYUSUNAN RENSTRA K/L 2020-2024, oleh Taufik Hanafi, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Bappenas

- a. Memastikan Sinkronisasi Renstra K/L dengan RPJMN 2020-2024 (Perpres No.18/2020)
- b. Fokus Renstra K/L diarahkan untuk mencapai target RPJMN 2020 - 2024.
- c. Memastikan kesiapan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dengan menyusun tahapan dan prioritas yang jelas dan terukur



- d. Memperkuat sistem evaluasi dan pengendalian internal K/L dan integrasinya dengan sistem evaluasi dan pengendalian terpadu nasional

PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI RENSTRA K/L MITRA KEDEPUTIAN POLHUKHANKAM, oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan, Bappenas

- Visi Indonesia : Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur
- Pagu Renstra Mitra K/L D7 2020-2024 disesuaikan dengan Pagu Indikatif RPJMN 2020-2024
- Target dan alokasi indikatif Output Prioritas disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024
- Akan diadakan Pembahasan Bilateral, yang bisa melibatkan pihak (K/L) lain
- Penetapan Renstra K/L 3 bulan kedepan setelah Perpres RPJMN
- Penyusunan RKP 2021 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L 2020-2024
- RKP 2021 merupakan tahapan RPJMN pada tahun 2021, juga merupakan tahapan Renstra K/L pada tahun 2021.
- Rumusan Prioritas Pembangunan tidak berubah (akan tetap selama 5 Tahun), namun bisa tambah apabila ada dinamika tertentu, misalkan arahan presiden pada sidang Kabinet.

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan dari Bapak lebih lanjut.

Kepala Bagian Perencanaan dan
Evaluasi,

Endrizal

